



Fenomena 'Nuthuk Rego' di Malioboro



FENOMENA
nuthuk rego kembali menjadi perbincangan saat tayangan youtube berisi keluhan wisatawan di Malioboro viral beberapa hari lalu. Istilah yang berasal dari bahasa Jawa ini secara sederhana berarti mematok harga sangat tinggi atau "menggetok harga". Banyak orang langsung menilai praktik ini sebagai bentuk ketidakjujuran pedagang terhadap wisatawan. Namun jika ditelaah lebih dalam, persoalan *nuthuk rego* sebenarnya tidak sesederhana itu. Ia berada di persimpangan antara logika pasar, etika bisnis, dan tata kelola pariwisata.

Dalam logika pasar, harga pada dasarnya terbentuk melalui pertemuan antara penawaran dan permintaan. Selama tidak ada paksaan atau penipuan informasi, transaksi itu disebut sebagai pertukaran sukarela. Artinya, kedua belah pihak sama-sama memperoleh manfaat. Dalam konteks wisata, harga lebih mahal sering dianggap wajar karena faktor lokasi strategis, tingginya biaya operasional, dan tingginya permintaan wisatawan.

Masalah muncul ketika harga tidak disampaikan secara transparan. Wisatawan baru mengetahui besarnya tarif setelah transaksi selesai, atau harga berubah secara tiba-tiba di tengah layanan. Dalam ilmu ekonomi kondisi ini dikenal sebagai *Information Asymmetry*, yakni ketimpangan informasi antara penjual dan pembeli. Penjual mengetahui harga sebenarnya, sementara pembeli tidak memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan rasional. Dalam situasi seperti ini, *nuthuk rego* bukan lagi sekadar harga mahal, tetapi menjadi praktik yang berpotensi merugikan.

Fenomena *nuthuk rego* di Malioboro berdampak: Pertama, Memurunkan kepercayaan wisatawan terhadap pedagang atau penyedia jasa. Kedua, Merusak citra destinasi wisata, karena keluhan mudah menyebar lewat cerita wisatawan dan media sosial. Ketiga, Mengurangi minat kunjungan ulang

AA Haslan

wisatawan yang pernah merasa dirugikan. Keempat, Menciptakan persaingan usaha tidak sehat antara pedagang yang mematok harga tinggi dan yang menetapkan harga wajar. Kelima, Menimbulkan konflik atau ketegangan transaksi antara penjual dan pembeli. Keenam, Mengganggu keseimbangan pasar wisata, karena informasi harga tidak transparan dalam perspektif Microeconomics. Namun di sisi lain, tidak semua *nuthuk rego* dapat disamakan dengan penipuan. Ada kalanya wisatawan sebenarnya sudah mengetahui bahwa harga yang ditawarkan lebih tinggi dari harga normal, tetapi tetap memilih untuk membeli karena faktor kenyamanan, lokasi, atau pengalaman wisata. Dalam kondisi ini terbentuk apa yang sering disebut sebagai "harga wisata", yaitu harga yang memang lebih tinggi dibandingkan harga untuk warga lokal. Fenomena semacam ini tidak hanya terjadi di Yogyakarta, tetapi juga di hampir semua destinasi wisata dunia.

Karena itu, pendekatan yang terlalu menekankan penertiban saja sering tidak cukup. Razia atau operasi terhadap pedagang memang penting untuk menindak oknum yang benar-benar menipu wisatawan, tetapi solusi jangka panjang memerlukan perbaikan ekosistem ekonomi wisata secara menyeluruh. Transparansi harga menjadi kunci utama. Menu makanan yang jelas, papan tarif jasa transportasi wisata, serta standar parkir resmi dapat mengurangi ruang bagi praktik getok harga. Ketika wisatawan mengetahui harga sejak awal, mereka dapat menentukan pilihan secara rasional.

Selain transparansi, digitalisasi transaksi dapat membantu menciptakan sistem yang terbuka. Sistem pembayaran digital seperti QRIS memungkinkan harga tercatat de-

ngan jelas dan meminimalkan potensi manipulasi tarif. Dalam jangka panjang, digitalisasi tidak hanya meningkatkan kenyamanan wisatawan, tetapi juga membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi di kawasan wisata.

Pada akhirnya, *nuthuk rego* tidak dapat dilihat semata-mata sebagai persoalan moral pedagang atau keluhan wisatawan. Ia mencerminkan dinamika ekonomi di kawasan wisata yang mempertemukan kepentingan berbagai pihak: pelaku usaha yang ingin memperoleh keuntungan, wisatawan yang mencari pengalaman, serta pemerintah yang berupaya menjaga reputasi destinasi. Jika dikelola dengan baik melalui transparansi harga, edukasi konsumen, dan tata kelola yang jelas, kawasan wisata seperti Jalan Malioboro tetap dapat berkembang tanpa kehilangan kepercayaan publik. Dalam konteks itulah *nuthuk rego* seharusnya dipahami bukan sekadar sebagai masalah harga mahal, melainkan sebagai tantangan untuk menciptakan pasar wisata yang lebih jujur, sehat, dan berkelanjutan. (*)-d

*)AA Haslan, Pemerhati UMKM & Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.

Pojok KR

BMKG : Waspada cuaca panas dan hujan saat mudik.
 - **Jangan sampai niat hati melepas rindu, malah tumbang karena suhu.**

Muhammadiyah : Bangsa Indonesia perlu konsolidasi nasional.
 - **Rapatkan barisan demi bangsa, bukan demi golongan.**

Kemendikdasmen luncurkan 'Mudik asyik baca buku'.
 - **Cara keren biar isi kepala nggak ikut macet di jalanan.**

Berada

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Mei 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005